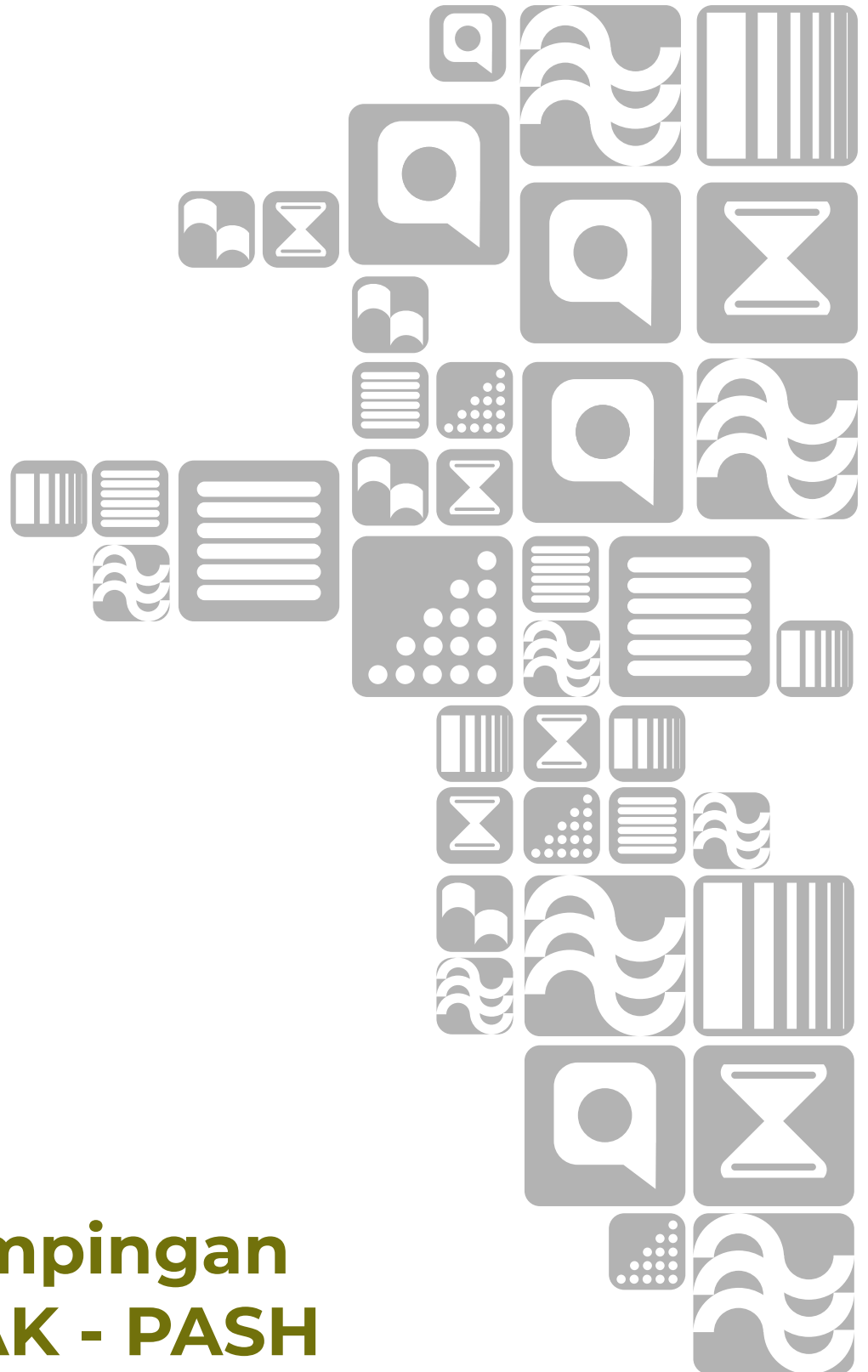




# Cerita Pendampingan KOMPAK - PASH

di Provinsi Papua dan Papua Barat





# Cerita Pendampingan KOMPAK - PASH

di Provinsi Papua dan Papua Barat

# Daftar Isi

A.	Situasi Awal Sistem Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati di Provinsi Papua dan Papua Barat	3
B.	Desain Awal Program Unggulan ( <i>Flagship</i> ) KOMPAK - PASH	10
C.	Cerita Pendampingan Program PASH 2016–2018	13
D.	Transisi Periode 2018: Penyesuaian Fokus Program PASH KOMPAK	17
E.	Perkembangan Pendekatan Program PASH 2019–2021 di Asmat, Jayapura, Nabire, Fakfak, Manokwari Selatan, dan Sorong	20
F.	Kolaborasi dengan Program Unggulan ( <i>Flagship</i> ) KOMPAK Lainnya	30
G.	Pembelajaran	32
	Lampiran: Peraturan yang Didukung Program	36

**D**ari tahun 2015 hingga 2022, kemitraan antara Pemerintah Indonesia yang dikoordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemerintah Australia melalui Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), telah mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk menguatkan layanan dasar dan memberdayakan ekonomi dalam rangka mengurangi kemiskinan.

Melalui kemitraan dengan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA), Bappenas dan KOMPAK merancang dan mengimplementasikan program Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH).

Program PASH bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dan unit-unit layanan terkait dalam melakukan pencatatan warga tanpa terkecuali (inklusif), terutama yang miskin dan rentan. Sebagai luarannya, semua warga terpenuhi hak identitas hukumnya dan dapat menggunakan dokumen kependudukannya untuk mengakses layanan dasar bagi kesejahteraannya. Selain itu, data warga dikelola untuk menjadi dasar bagi perencanaan dan perbaikan layanan dasar tersebut (akuntabel).

Dokumen ini merangkum cerita perjalanan, capaian, dan pembelajaran dari implementasi program PASH di wilayah Papua dan Papua Barat. Rancangan program KOMPAK di wilayah Papua dan Papua Barat ini berbeda dengan wilayah dampingan KOMPAK lainnya seperti Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.<sup>1</sup>


Meskipun wilayah dampingan KOMPAK di Provinsi Papua dan Papua Barat mencakup 10 kabupaten, pada tahun 2018, PASH hanya difokuskan pada empat kabupaten, yaitu Kabupaten Jayapura, Asmat, Manokwari Selatan, dan Sorong. Pada awal perancangannya, program PASH sengaja memilih beberapa kecamatan wilayah kerja sama di kabupaten-kabupaten tersebut, dan dalam perjalanannya, cakupan program berkembang dan meluas ke beberapa wilayah lainnya, antara lain Nabire dan Fakfak.

Dokumen ini disusun secara deskriptif kronologis setelah mengolah data dari 91 dokumen yang terdiri atas laporan kegiatan, laporan penelitian, lembar kebijakan, dokumen teknis, serta buletin. Nantinya, dokumen ini akan menunjang analisis sintesis untuk laporan akhir program PASH secara keseluruhan

---

<sup>1</sup> Implementasi PASH di Papua dan Papua Barat dilakukan belakangan menyusul wilayah-wilayah KOMPAK lainnya. Sejak awal, KOMPAK juga menyadari tantangan di Papua dan Papua Barat yang khas dibanding wilayah lainnya. Dengan mempertimbangkan situasi tersebut, implementasi PASH mengikuti pendekatan perancangan program KOMPAK di Papua dan Papua Barat yang disinergikan dengan program-program kemitraan Indonesia-Australia yang sudah terlebih dahulu dilakukan untuk memaksimalkan capaian.





## **A. Situasi Awal Sistem Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati di Provinsi Papua dan Papua Barat**

Berbeda dengan daerah dampingan KOMPAK lainnya,<sup>2</sup> wilayah Papua dan Papua Barat memulai pemetaan situasi awal sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati pada tahun 2018. Program PASH melakukan kajian cepat mengenai situasi administrasi kependudukan (adminduk) di wilayah Papua Barat, yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Sorong, pada tahun 2018.<sup>3</sup> Sementara itu, studi di Provinsi Papua tidak dapat direalisasikan karena situasi politik yang tidak kondusif.<sup>4</sup> Situasi pergantian pemimpin di Papua mengakibatkan banyaknya kekosongan jabatan di kantor pemerintahan sehingga wawancara tidak mungkin dilakukan. Walaupun demikian, program tetap

mengumpulkan informasi dari mitra, narasumber, dan laporan kegiatan lain yang beririsan dengan isu adminduk di Papua.

Berdasarkan hasil dari berbagai asesmen dan studi yang dilakukan, program PASH merumuskan sejumlah masalah utama yang menghambat berjalannya sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati yang inklusif (menjangkau semua orang) dan akuntabel (bertanggung jawab). Secara umum, permasalahan PASH diakibatkan oleh hambatan yang dialami masyarakat dalam mengakses layanan (*demand side*), hambatan yang datang dari penyedia layanan (*supply side*), serta kebijakan dan lingkungan pendukung (*enabling environment*) sistem yang tidak berfungsi dengan baik.

---

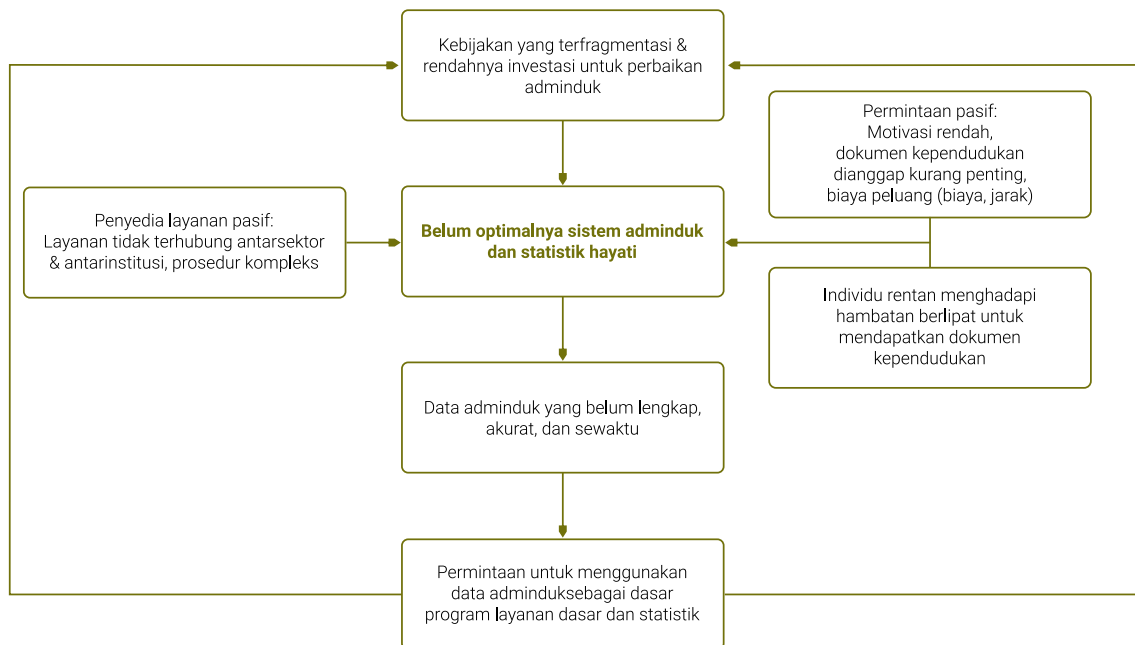
<sup>2</sup> Untuk memastikan program yang didukung KOMPAK dapat secara efektif memperbaiki sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati, pada tahun 2015, KOMPAK dan PUSKAPA melakukan studi formatif di tiga kecamatan di tiga kabupaten, yaitu Aceh Barat, Pekalongan, dan Pangkep untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai situasi adminduk. Selain itu, berbagai asesmen dan pemetaan masalah terkait PASH juga dilakukan di seluruh wilayah uji coba KOMPAK. Analisis situasi juga dilakukan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat, serta hasil penelusuran regulasi di tingkat daerah yang relevan.

<sup>3</sup> Rizky, E., dkk. (2019). *Laporan Kajian Cepat: Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati di Papua Barat Juni 2018*. PUSKAPA. [dokumen tidak diterbitkan].

<sup>4</sup> Moerti, M. (31 Desember 2018). *Tragedi Berdarah Papua di Penghujung Tahun 2018*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/tragedi-berdarah-papua-di-penghujung-2018.html>



## Bagan 1. Pemetaan Masalah terkait Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati



### Hambatan dari Sisi Individu (*Demand Side*)

Kendala terkait jarak yang jauh, biaya pengurusan,<sup>5</sup> dan kerumitan proses pengurusan dokumen didapati menjadi hambatan yang dihadapi penduduk dalam memperoleh dokumen kependudukan. Misalnya di Kabupaten Manokwari Selatan, masyarakat menganggap bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bekerja sangat lambat dan tidak bisa memastikan jangka waktu layanan. Akibatnya, warga harus bolak-balik ke Disdukcapil untuk memastikan hasil pengurusan dokumen mereka dan

terpaksa menambah biaya perjalanan serta meluangkan lebih banyak waktu dan tenaga. Walaupun tidak ada biaya administrasi karena semua layanan telah digratiskan, tetapi masyarakat harus mengeluarkan ongkos menuju kantor Disdukcapil sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000. Kendala yang sama juga dialami warga di Kabupaten Asmat, Papua. Warga di kabupaten ini juga kesulitan mengurus adminduk di kantor Disdukcapil yang letaknya jauh dari permukiman.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Biaya pengurusan di sini adalah biaya di luar biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh pemohon, seperti biaya transportasi, biaya fotokopi, atau biaya jasa pengurusan informal.

<sup>6</sup> Rizky, E., dkk. (2019). Laporan Kajian Cepat: Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati di Papua Barat Juni 2018. [dokumen tidak diterbitkan]

Sistem dan pencatatan juga tidak optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan peristiwa penting mereka. Di Provinsi Papua dan Papua Barat, ada banyak pasangan yang telah menikah secara adat, tetapi belum memiliki bukti nikah sehingga kelahiran anak tidak dapat langsung dicatatkan atas nama ayah dan ibu. Untuk mendapatkan bukti nikah, pasangan tanpa bukti nikah ini dirujuk untuk mengikuti nikah massal. Namun, tidak semua warga mau, terutama ketika ada kewajiban adat yang belum diselesaikan.

Berdasarkan data Susenas 2016, alasan terbesar penduduk berusia 0–17 tahun tidak memiliki akta kelahiran di Provinsi Papua Barat adalah tempat mengurus yang jauh (22%) dan akta belum terbit (21%). Dalam sebuah studi lain, hal-hal tersebut juga ditemukan sebagai faktor yang menghambat warga dalam mencatatkan peristiwa kependudukannya, di samping tiga faktor terbesar yakni biaya (41%), jarak yang jauh ke lokasi layanan (15%), dan proses rumit yang membutuhkan pengurusan berkali-kali (9%).<sup>7</sup>

## Hambatan dari Sisi Penyedia Layanan (*Supply Side*)

Kapasitas staf Disdukcapil di wilayah Papua dan Papua Barat untuk memberikan layanan adminduk dinilai masih kurang memadai. Di Kabupaten Sorong dan Manokwari Selatan, sebagian besar staf Disdukcapil merupakan rekrutan baru yang belum sepenuhnya memahami tugas pokok, fungsi, peraturan, dan program Disdukcapil sehingga kerap menghambat layanan adminduk. Pada tahun 2018, jumlah staf Disdukcapil Manokwari Selatan adalah 63 orang dan hanya 10 orang saja yang berstatus aparatur sipil negara, sementara yang lainnya berstatus pegawai honorer.<sup>8</sup> Jumlah staf ini belum sebanding dengan warga yang datang untuk mengurus dokumen kependudukan.

Walaupun sudah ada regulasi di tingkat pusat untuk memastikan layanan adminduk lebih dekat dengan masyarakat di tingkat kecamatan, seperti dengan upaya membentuk unit layanan Disdukcapil, upaya ini belum dilakukan di wilayah Papua dan Papua Barat. Di Kabupaten Sorong, kantor Disdukcapil hanya berada di tingkat kabupaten dan bisa ditemukan di kompleks pemerintahan yang jauh dari permukiman warga. Persoalan serupa juga ditemukan di Kabupaten Asmat, Papua. Untuk mencapai pusat pemerintahan kabupaten, warga dari beberapa kecamatan harus menempuh perjalanan selama lima jam menggunakan kapal cepat.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Sumner & Kusumaningrum. (2014). *Indonesia's Missing Millions: AIPJ Baseline Study on Legal Identity*. PUSKAPA.

<sup>8</sup> Rizky, E., dkk. (2019). *Laporan Kajian Cepat: Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati di Papua Barat Juni 2018*. [dokumen tidak diterbitkan]

<sup>9</sup> PUSKAPA. (2019). *Laporan Refleksi BANGGA Papua PUSKAPA-KOMPAK*. [dokumen tidak diterbitkan]

## Hambatan dari Sisi Kebijakan dan Lingkungan Pendukung (*Enabling Environment*)

Dalam kajian cepat yang dilakukan tahun 2018,<sup>10</sup> ditemukan banyak pasangan yang menikah secara adat, tetapi tidak tercatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Disdukcapil. Pasangan-pasangan tersebut kesulitan mengurus akta kelahiran bagi anak-anak mereka. Sebagai contoh, beberapa penduduk memiliki lebih dari satu orang istri, tetapi gereja hanya berkenan menerbitkan Surat Pemberkatan Perkawinan dengan istri pertama. Hal ini membuat pelaporan perkawinan istri kedua dan seterusnya menjadi sulit karena tidak disertai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan.

Berdasarkan hasil penelusuran regulasi yang dilakukan pada tahun 2018, pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat masih belum memiliki peraturan daerah (perda) terkait adminduk. Pada tahun 2010, sempat ada pembahasan perda tentang administrasi kependudukan yang juga mengatur pendataan Orang Asli Papua, tetapi hingga tahun 2018, perda tersebut tidak berhasil dirampungkan karena belum ada kesepakatan terkait definisi Orang Asli Papua.

Persoalan teknis akibat kurangnya infrastruktur dan tantangan geografis memengaruhi waktu pelayanan dokumen adminduk bagi masyarakat, khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat. Disdukcapil Manokwari Selatan di Papua Barat mengaku mengalami pemadaman listrik hampir setiap hari. Jika listrik padam, layanan adminduk akan dihentikan sementara karena server harus dimatikan. Tantangan serupa juga dialami oleh Disdukcapil Sorong, yang memutuskan untuk tidak menggunakan genset ketika terjadi pemadaman karena listrik yang dihasilkan mesin tersebut tidak stabil dan bisa menyebabkan kerusakan server. Selain itu, kendala terkait listrik dan jaringan telekomunikasi juga ditemukan di Asmat.<sup>11</sup>

Persoalan migrasi data adminduk akibat pemekaran daerah juga ditemukan di Kabupaten Manokwari Selatan. Kabupaten Manokwari Selatan merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Manokwari pada tahun 2012. Disdukcapil Kabupaten Manokwari Selatan pun baru dibentuk pada tahun 2013. Akibat persoalan migrasi data tersebut, cakupan kepemilikan akta kelahiran anak dalam SIAK tahun 2018 di Kabupaten Manokwari Selatan tercatat sangat rendah.

---

<sup>10</sup> Rizky, E., dkk. (2019). *Laporan Kajian Cepat: Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati di Papua Barat Juni 2018*. [dokumen tidak diterbitkan]

<sup>11</sup> KOMPAK. (2018). *Laporan Kunjungan Lapangan Joint Monitoring DFAT-BAPPENAS: Kemajuan Pelaksanaan Program KOMPAK di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, 20-24 September 2018*. [dokumen tidak diterbitkan]

## Analisis Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Susenas 2015

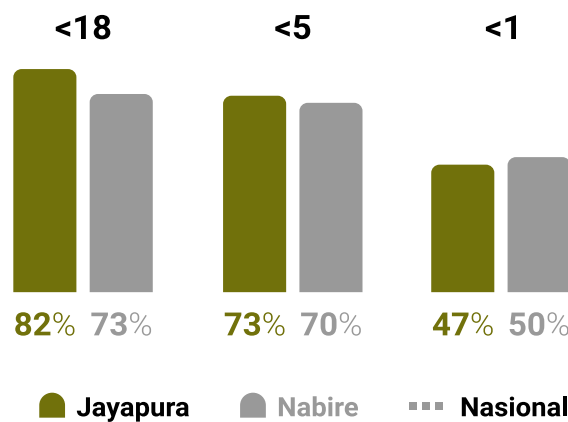
Analisis cakupan kepemilikan akta kelahiran<sup>12</sup> melalui Susenas 2015 untuk Kabupaten dampingan KOMPAK di Provinsi Papua (Kabupaten Jayapura dan Nabire) dan Papua Barat (Kabupaten Sorong, Fakfak, dan Manokwari Selatan) juga memberikan gambaran mengenai situasi kepemilikan dokumen di tiap wilayah yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan desain program yang nantinya diimplementasikan.

Belum optimalnya sistem adminduk dan statistik hayati di kabupaten-kabupaten dampingan KOMPAK di Provinsi Papua dan Papua Barat ditunjukkan dengan masih rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran, khususnya pada anak baru lahir. Diagram 1 menunjukkan pola cakupan kepemilikan akta kelahiran yang makin kecil pada anak baru lahir (usia 1

dan 5 tahun) di Indonesia. Pola serupa juga terlihat di hampir seluruh kabupaten dampingan KOMPAK di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Di Jayapura, cakupan kepemilikan akta kelahiran sebesar 82% pada penduduk usia di bawah 18 tahun, 73% pada penduduk usia di bawah 5 tahun, dan hanya 47% pada penduduk usia di bawah 1 tahun. Di Nabire, cakupan kepemilikan akta kelahiran sebesar 73% pada penduduk usia di bawah 18 tahun, 70% pada penduduk usia di bawah 5 tahun, dan hanya 50% pada penduduk usia di bawah 1 tahun. Selain itu, hampir seluruh kabupaten dampingan KOMPAK di Papua menunjukkan cakupan kepemilikan akta kelahiran di bawah angka nasional, khususnya pada penduduk usia di bawah 5 tahun dan di bawah 1 tahun.

**Diagram 1. Estimasi Cakupan Akta Kelahiran Menurut Usia (U18, U5, U1) di Kabupaten Dampingan KOMPAK di Provinsi Papua pada Tahun 2015 (Susenas, 2015)**

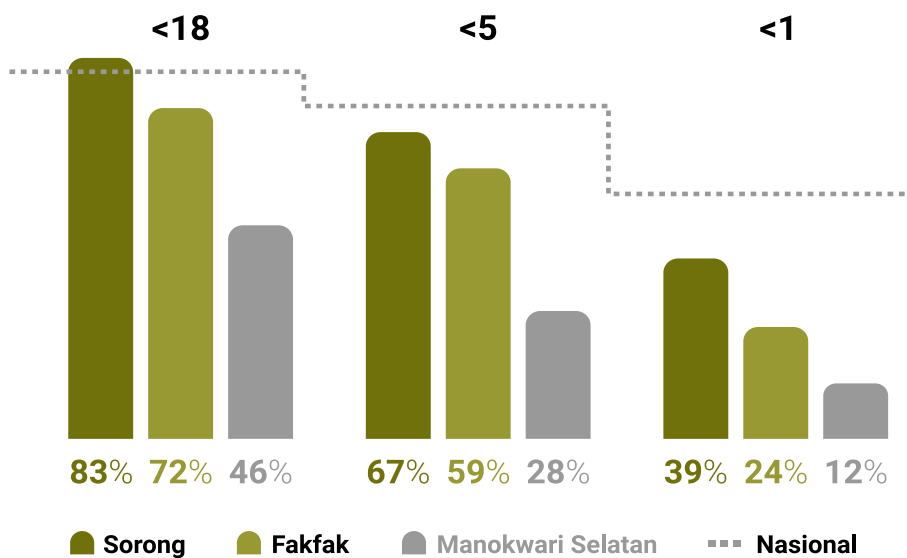


<sup>12</sup>Berdasarkan responden yang mengaku memiliki akta kelahiran.

Diagram 2 menunjukkan pola serupa untuk kabupaten dampingan KOMPAK di Provinsi Papua Barat. Di Kabupaten Sorong, cakupan kepemilikan akta kelahiran sebesar 83% pada penduduk usia di bawah 18 tahun, 67% pada penduduk usia di bawah 5 tahun, dan hanya 39% pada penduduk usia di bawah 1 tahun. Di Kabupaten Fakfak, cakupan kepemilikan akta kelahiran sebesar 72% pada penduduk usia di bawah 18 tahun, 58% pada penduduk usia di bawah 5 tahun, dan hanya 24% pada penduduk usia di bawah 1 tahun. Sementara di Kabupaten Manokwari Selatan, cakupan

kepemilikan akta kelahiran sangat rendah baik pada penduduk usia di bawah 18 tahun, 5 tahun, maupun 1 tahun. Cakupan kepemilikan akta kelahiran sebesar 46% pada penduduk usia di bawah 18 tahun, 28% pada penduduk usia di bawah 5 tahun, dan hanya 12% pada penduduk usia di bawah 1 tahun. Selain itu, hampir seluruh kabupaten dampingan KOMPAK di Provinsi Papua Barat menunjukkan cakupan kepemilikan akta kelahiran di bawah angka nasional, khususnya pada penduduk usia di bawah 5 tahun dan di bawah 1 tahun.

**Diagram 2. Estimasi Cakupan Akta Kelahiran Menurut Usia (U18, U5, U1) di Kabupaten Dampingan KOMPAK di Provinsi Papua Barat pada Tahun 2015**  
(Susenas, 2015)



Catatan: Estimasi tidak dapat menunjukkan keterwakilan tingkat kabupaten secara akurat karena jumlah sampel yang rendah



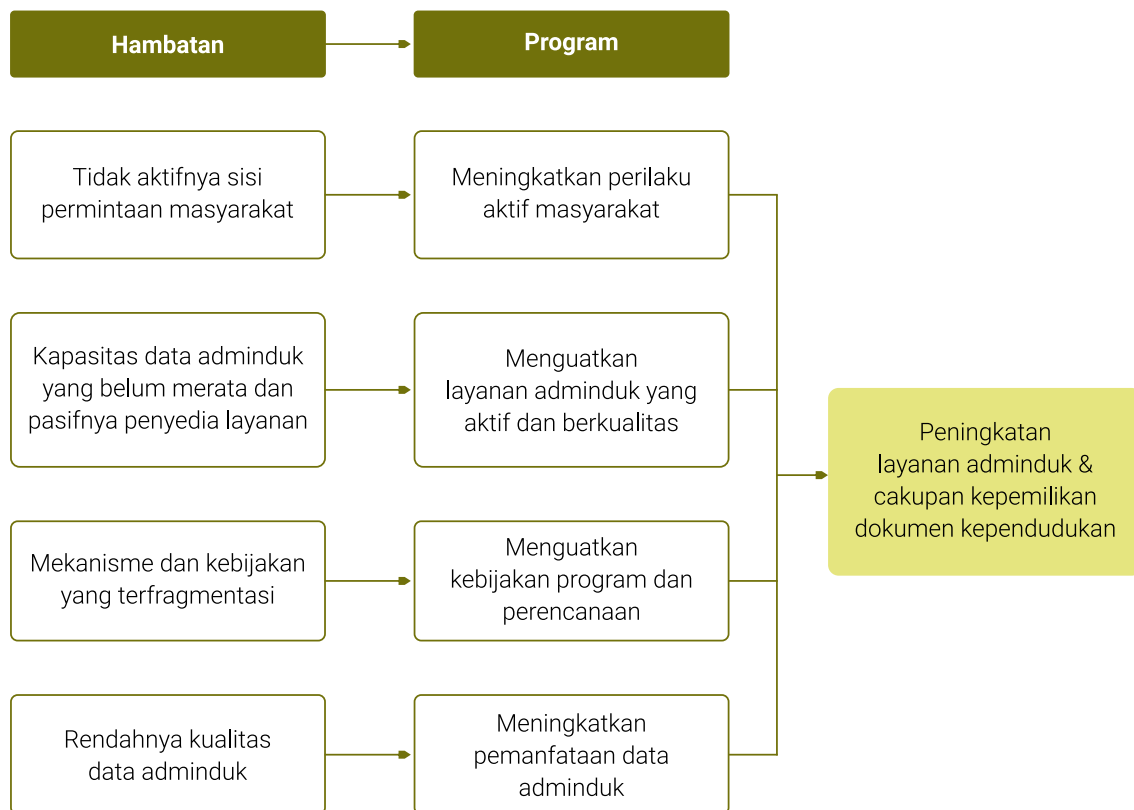
## B. Desain Awal Program Unggulan (Flagship) KOMPAK - PASH<sup>13</sup>

<sup>13</sup> PUSKAPA. (2016). *CRVS Program Design, a Collaboration Between Center on Child Protection & Wellbeing (PUSKAPA) Universitas Indonesia with the Ministry of National Development Planning (Bappenas) and Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)*. PUSKAPA

Berdasarkan hasil analisis situasi dan pemetaan masalah yang dilakukan pada awal perancangannya, program PASH mengembangkan berbagai kegiatan yang ditargetkan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pengumpulan informasi, asistensi teknis, komunikasi untuk mengubah perilaku, dukungan terhadap lembaga masyarakat, serta uji coba dan penyempurnaan

berbagai model implementasi. Kegiatan-kegiatan ini diarahkan untuk memperbaiki sistem adminduk melalui peningkatan perilaku aktif masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, peningkatan layanan adminduk yang aktif dan berkualitas, penguatan kebijakan dan sistem operasional untuk mewujudkan layanan yang efektif, serta peningkatan pemanfaatan data kependudukan.

## Bagan 2. Desain Awal Program PASH



Desain program KOMPAK di Provinsi Papua dan Papua Barat berbeda dari desain program di provinsi dampingan KOMPAK lainnya. Program KOMPAK di Papua dan Papua Barat meneruskan program Kemitraan Indonesia-Australia untuk Desentralisasi (*Australia-Indonesian Partnership for Decentralisation/AIPD*) yang sebelumnya sudah berjalan sejak tahun 2014, yaitu program Perbaikan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan (LANDASAN).<sup>14</sup> Program LANDASAN difokuskan pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan pemberi layanan lini depan untuk mengelola layanan dasar secara efektif. Selanjutnya, program LANDASAN-KOMPAK ini disebut LANDASAN II yang implementasinya dilakukan sejak tahun 2017 melalui kerja sama dengan mitra Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).

Selain LANDASAN II, KOMPAK juga berkontribusi mendukung perlindungan sosial di Provinsi Papua melalui Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua yang Sejahtera atau disingkat dengan BANGGA Papua. BANGGA Papua merupakan program yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Papua menggunakan dana otonomi khusus dengan dukungan kemitraan Indonesia-Australia melalui Menuju Masyarakat Indonesia Yang Kokoh Sejahtera (MAHKOTA) dan KOMPAK.<sup>15</sup> BANGGA Papua diluncurkan sejak 12 November 2017 dan bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak.

---

<sup>14</sup>LANDASAN. (2016). *LANDASAN Program Document*. [dokumen tidak diterbitkan]

<sup>15</sup>KOMPAK. (2019). *Laporan Akhir Tahun: Kegiatan Komunikasi BANGGA Papua*. KOMPAK & BaKTI.





## C. Cerita Pendampingan Program PASH 2016–2018

## BANGGA Papua

BANGGA Papua diuji coba di tiga kabupaten di Papua, yaitu Kabupaten Asmat, Lanny Jaya, dan Paniai. BANGGA Papua memberikan bantuan tunai sebesar Rp200.000 per bulan kepada anak Orang Asli Papua yang berusia 4 tahun ke bawah dan juga memberikan pengetahuan kepada orang tua tentang pentingnya gizi bagi anak mereka.

Pada tahun 2018, Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2018 tentang BANGGA Papua disahkan dan penyaluran bantuan pertama program BANGGA Papua dapat dilakukan.<sup>16</sup> Selanjutnya, penyaluran bantuan tahun kedua dan ketiga dilakukan pada tahun 2019.

Sejak awal pelaksanaan program BANGGA Papua, pemerintah ketiga kabupaten melibatkan bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk mengawal proses pendataan calon penerima bantuan. Sekretariat BANGGA Papua Kabupaten Asmat sejak awal melibatkan Disdukcapil dan menggunakan formulir yang elemen datanya sesuai dengan persyaratan SIAK untuk menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan menggunakan formulir tersebut, NIK bagi calon penerima bantuan dapat diterbitkan lebih cepat.<sup>17</sup>

Pada awal tahun 2019, tim program PASH turut memantau pencairan dana BANGGA Papua untuk mendapatkan informasi tentang pemanfaatan data adminduk. Hasil pemantauan tersebut

memberikan pembelajaran dan rekomendasi untuk implementasi PASH serta strategi adopsi Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) di Papua dan Papua Barat.

Dalam program BANGGA Papua, beberapa tahapan dalam proses penyaluran bantuan sangat terkait dengan adminduk.<sup>18</sup> Pada tahap pertama, yaitu pendaftaran, calon penerima manfaat yang belum memiliki dokumen kependudukan, khususnya NIK, diarahkan untuk mengurus adminduk ke Disdukcapil. Pada tahap selanjutnya, tahap pendataan, data calon penerima manfaat diverifikasi melalui data SIAK kabupaten. Kemudian, data calon penerima manfaat diverifikasi melalui sistem informasi BANGGA Papua. Pada tahap pencairan dana, penerima manfaat yang belum pernah mendapatkan bantuan harus memverifikasi kelengkapan data dengan menunjukkan dokumen kependudukan serta menandatangani pembukaan rekening di tempat yang ditunjuk.

<sup>16</sup> Situs Resmi BANGGA Papua. <https://info.bangga.papua.go.id/infografis>.

<sup>17</sup> PUSKAPA. (2019). *Laporan Refleksi BANGGA Papua PUSKAPA – KOMPAK*. [dokumen tidak diterbitkan]

<sup>18</sup> Sharing session pelaksanaan BANGGA Papua dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Sekber BANGGA Papua Provinsi Papua, 26 November 2020. <https://info.bangga.papua.go.id/sharing-session-bangga-papua/>

Berdasarkan hasil evaluasi, program BANGGA Papua dianggap telah berhasil menysasar kelompok yang paling membutuhkan, yaitu anak-anak dan perempuan, dengan memberdayakan dan meningkatkan pendapatannya.<sup>19</sup> Program BANGGA Papua juga telah meningkatkan kepemilikan NIK bagi

Orang Asli Papua. Selain itu, program BANGGA Papua juga memberikan pembelajaran yang baik bagi Pemerintah Indonesia dalam upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya terkait infrastruktur, proses distribusi, serta pengalaman penerima manfaat dalam program bantuan langsung.<sup>20</sup>

## LANDASAN II

Pada tahun 2017, pendampingan KOMPAK-LANDASAN II mulai dilakukan di 28 kecamatan yang tersebar di 10 kabupaten di Papua dan Papua Barat. Kabupaten terpilih di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Kaimana, Manokwari Selatan, Sorong, dan Fakfak, sedangkan di Provinsi Papua adalah Kabupaten Jayapura, Asmat, Nabire, Boven Digoel, Waropen, dan Lanny Jaya.

Program LANDASAN II meneruskan inisiatif-inisiatif yang sudah dibangun sebelumnya pada LANDASAN I, antara lain kerja sama antar-unit layanan, khususnya puskesmas dan sekolah, serta kader kampung dalam upaya perbaikan layanan dasar. Selain itu, LANDASAN II juga mendukung pemanfaatan data berbasis masyarakat yang dikelola melalui SAIK.<sup>21</sup>

sektor kesehatan, petugas-petugas lini depan melakukan pencatatan untuk peristiwa seperti kelahiran, kematian bayi, kematian yang terjadi di fasilitas kesehatan, dan data-data sejenisnya yang berpotensi membantu pemutakhiran data kependudukan. Walaupun belum optimal, SAIK juga sudah mulai digunakan di beberapa kampung (desa).

Sejalan dengan dukungan yang diberikan melalui LANDASAN,<sup>22</sup> kajian cepat pada tahun 2018 menemukan sejumlah modalitas kerja sama lintas sektor yang kuat di Kabupaten Sorong dan Manokwari Selatan. Misalnya, di

---

<sup>19</sup> Presentasi Karishma Huda & Heracles Lang mengenai "Hasil Evaluasi Program Bangga Papua" dalam Webinar BANGGA Papua: Bantuan Tunai Menjangkau Tempat Terpencil, 16 November 2020.

<sup>20</sup> Presentasi Vivi Yulaswati, Staf Ahli Menteri PPN mengenai "Pembelajaran dari Bangga Papua" dalam Webinar BANGGA Papua: Bantuan Tunai Menjangkau Tempat Terpencil, 16 November 2020 <https://info.bangga.papua.go.id/webinar-bangga-papua/>

<sup>21</sup> KOMPAK. (2018). LANDASAN: Memperkuat Layanan Dasar di Papua dan Papua Barat melalui Data Kampung Berbasis Masyarakat. <https://kompak.or.id/en/article/landasan-program>.

<sup>22</sup> AKATIGA. (2015). Potret Tata Kelola Pelayanan Publik (Pendidikan dan Kesehatan) di Tanah Cendrawasih: Laporan Studi Dasar Landasan Papua Initiative. AIPD-AKATIGA.

Hingga April 2018, sekitar 199 kampung telah menerapkan SAIK dan sebanyak 403 orang kader kampung telah dilatih untuk mengelola dan memanfaatkan data SAIK.<sup>23</sup> Beberapa puskesmas dan sekolah dasar juga telah mengubah perencanaan kegiatan dan perbaikan

kualitas layanan dengan dukungan alokasi dana pembangunan kampung. Sistem Administrasi dan Informasi Distrik (SAID) juga diuji coba di Distrik (kecamatan) Sentani Timur di Kabupaten Jayapura.

---

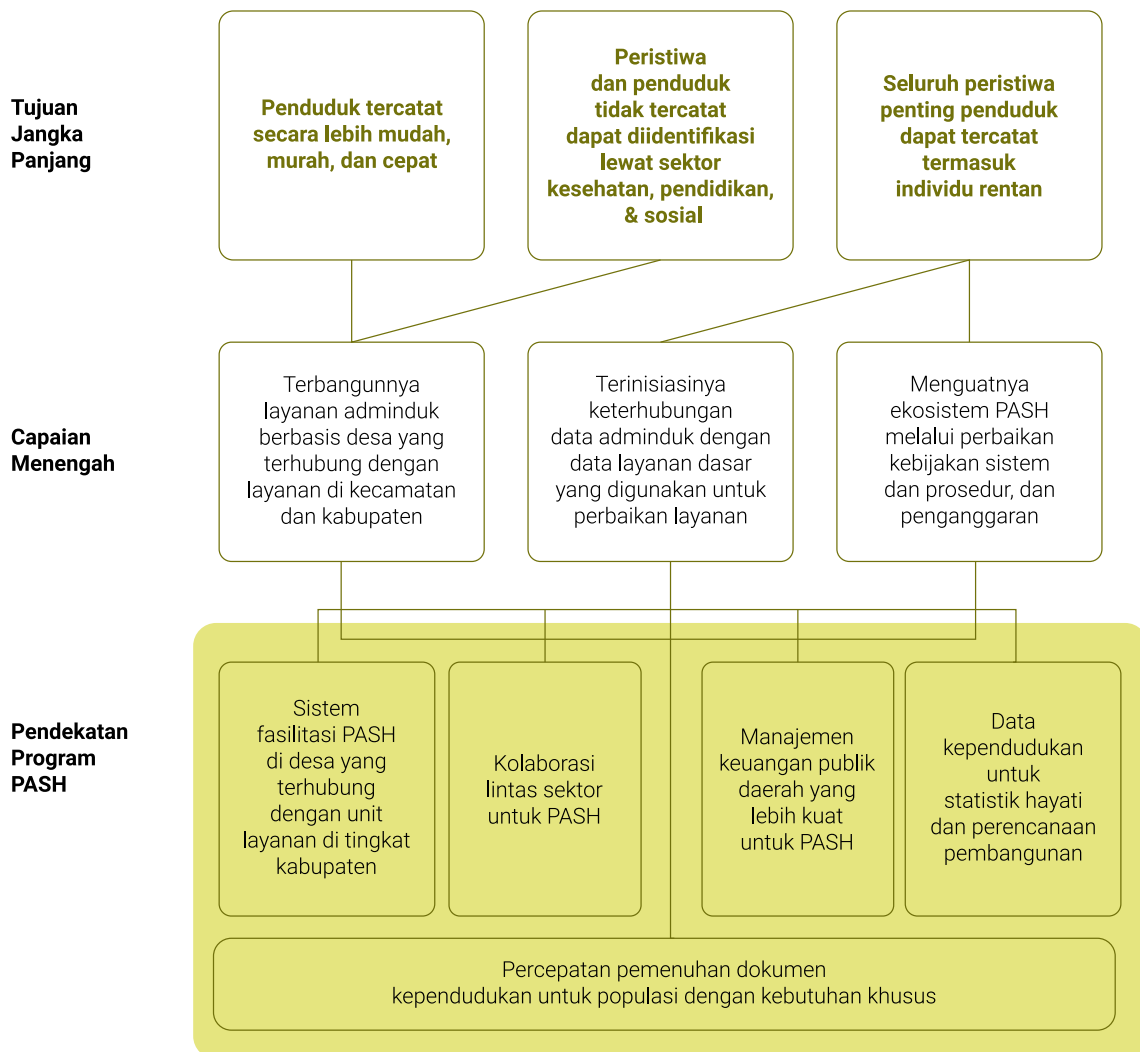
<sup>23</sup> KOMPAK. (2018). *LANDASAN: Memperkuat Layanan Dasar di Papua dan Papua Barat melalui Data Kampung Berbasis Masyarakat*. <https://kompak.or.id/en/article/landasan-program>.



## D. Transisi Periode 2018: Penyesuaian Fokus Program PASH KOMPAK

Pada tahun 2018, terjadi restrukturisasi dan penyesuaian fokus program-program KOMPAK untuk memastikan intervensi yang diberikan lebih efektif. Berdasarkan pembelajaran dari pendampingan selama periode 2016–2018, program PASH memfokuskan sumber dayanya untuk mendukung lima pendekatan utama: 1) sistem PASH berbasis desa yang terhubung dengan unit layanan di kabupaten; 2) kolaborasi lintas sektor untuk PASH; 3) manajemen keuangan publik daerah yang lebih kuat untuk PASH; 4) data kependudukan untuk statistik hayati dan perencanaan; dan 5) percepatan pengadaan dokumen kependudukan untuk populasi dengan kebutuhan khusus.

### Bagan 3. Lima Pendekatan Program PASH




Program PASH menerapkan strategi pemfokusan ulang dengan mempertimbangkan dampak terbesar yang mungkin dicapai dengan sumber daya yang tersedia sambil menjaga relevansi dengan masalah yang ingin diselesaikan. Tahapan atau tingkat implementasi yang dilakukan untuk masing-masing pendekatan akan disesuaikan dengan situasi di masing-masing wilayah dampingan.

Dengan mempertimbangkan situasi lapangan, dinamika politik, dan ketersediaan faktor pendukung, pendampingan KOMPAK di Provinsi Papua dan Papua Barat hanya dilakukan di delapan kabupaten, tanpa menyertakan Kabupaten Waropen dan Lanny Jaya yang tidak lagi termasuk daerah dukungan. Sementara itu, untuk dukungan PASH, pendampingan awalnya hanya dilakukan di Kabupaten Jayapura, Asmat, Sorong, dan Manokwari Selatan. Namun, pada tahun 2019, Kabupaten Nabire dan Fakfak juga menunjukkan ketertarikan untuk mengadopsi PASH.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Berdasarkan hasil observasi pengelola program.



## **E. Perkembangan Pendekatan Program PASH di Asmat, Jayapura, Nabire, Fakfak, Manokwari Selatan, dan Sorong**



## Kolaborasi Lintas Sektor

Program KOMPAK-LANDASAN II sejak awal memang diarahkan untuk berfokus pada upaya membangun sinergi antara unit layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan (puskesmas dan sekolah dasar) dengan kampung.<sup>25</sup> Pertemuan antara kampung dan unit layanan menjadi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memaparkan dan menganalisis data permasalahan serta membahas solusinya bersama-sama sehingga rencana program sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan. Dalam proses ini, data SAIK juga sangat membantu dalam identifikasi masalah dan perencanaan.

Di samping itu, LANDASAN II juga menyelenggarakan lokakarya perencanaan bagi 12 kampung, 12 sekolah, dan 8 puskesmas<sup>26</sup> yang menghasilkan 12 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK), 7 Rencana Usulan Kegiatan (RUK), dan 10 Rencana Kerja Sekolah (RKS). Dari jumlah tersebut, 12 kampung, 10 sekolah, dan 7 puskesmas didampingi sampai tahap penyelesaian dokumen.<sup>27</sup>

Program berhasil menyusun serangkaian modul sinergi perencanaan yang berisi 1) penjelasan konsep sinergi perencanaan;

2) panduan untuk menjalankan perencanaan dalam model sinergi bagi kampung, SD, dan puskesmas; 3) panduan untuk memfasilitasi pelatihan maupun proses perencanaan dalam model sinergi untuk perencanaan kampung, SD, dan puskesmas; dan 4) dokumentasi pembelajaran dari upaya membangun sinergi perencanaan dalam program LANDASAN.

LANDASAN II juga mengembangkan panduan ringkas sinergi perencanaan antara kampung dan unit layanan berdasarkan implementasi yang telah dilakukan program LANDASAN di wilayah Papua dan Papua Barat.<sup>28</sup> Panduan perencanaan kampung ini menunjukkan cara membangun kampung melalui sinergi dengan unit layanan dasar kesehatan dan pendidikan. Panduan ini mendorong kampung agar menerapkan kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam musyawarah pembangunan kampung. Pada tahun 2020, panduan tersebut dikembangkan menjadi modul yang lebih sistematis sebagai bahan pembelajaran bagi kampung maupun unit layanan.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Rasyid, A.A., dkk. (2020). *Sinergi Perencanaan Pembangunan: Pembelajaran dari Program LANDASAN*. KOMPAK & BaKTI.

<sup>26</sup> KOMPAK & BaKTI. (2020). *Laporan Tiga Bulanan: Program LANDASAN II Periode Juli–September 2020*. [dokumen tidak diterbitkan]

<sup>27</sup> KOMPAK & BaKTI. (2020). *Laporan Tiga Bulanan: Program LANDASAN II Periode April–Juni 2020*. [dokumen tidak diterbitkan]

<sup>28</sup> KOMPAK & BaKTI. (2020). *Laporan Tiga Bulanan: Program LANDASAN II Periode Januari–Maret 2020*. [dokumen tidak diterbitkan]

<sup>29</sup> Rasyid, dkk. (2020). *Sinergi Perencanaan Pembangunan: Pembelajaran dari Program LANDASAN*. KOMPAK-BaKTI.

Selain itu, LANDASAN II melaksanakan *Training of Trainers* (ToT) tentang sinergi perencanaan antara kampung dan unit layanan bagi pelatih/fasilitator kabupaten<sup>30</sup>. Lokakarya pendampingan sinergi perencanaan antara kampung dan unit layanan pertama kali dilaksanakan di Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari

Selatan pada tahun 2019, sedangkan tujuh kabupaten lainnya mengadakan lokakarya ini pada tahun 2020. Berbagai kegiatan koordinasi juga dilakukan untuk memastikan ToT dan lokakarya pendampingan sinergi perencanaan berjalan dengan baik.

## **Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung – Otonomi Khusus (PROSPPEK-OTSUS)**

Pada tanggal 10-18 Desember 2020,<sup>31</sup> Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan dukungan dari KOMPAK dan BaKTI menyelenggarakan pelatihan bagi kader kampung dalam Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung–Otonomi Khusus (PROSPPEK-OTSUS).<sup>32</sup> Pelatihan diikuti oleh kader kampung dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Maybrat, Raja Ampat, Manokwari, Teluk Bintuni, dan Pegunungan Arfak. Mengingat situasi pandemi, pelatihan dilakukan secara daring dan diikuti oleh 984 orang kader kampung. Pelatihan ini bertujuan mempersiapkan kader kampung guna menjalankan tugasnya mengumpulkan data kependudukan serta mengoperasikan aplikasi Sistem Administrasi dan Informasi Kampung Plus (SAIK+).<sup>33</sup> Sejak tahun 2017,

Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mereplikasi SAIK+ untuk digunakan di seluruh kampung di Provinsi Papua Barat dalam rangka mendukung PROSPPEK-OTSUS.

Pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyalurkan dana PROSPPEK-OTSUS sebesar Rp250 juta/kampung bagi 1.742 kampung.<sup>34</sup> Dana ini salah satunya digunakan untuk memperkuat kapasitas kampung dalam memberikan layanan dasar dan membangun sinergi dengan unit layanan, khususnya sekolah dan puskesmas. Data kependudukan, potensi kampung, pendidikan, dan kesehatan dalam SAIK+ menjadi rujukan bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam merencanakan program pembangunan, termasuk penyediaan layanan dasar.

<sup>30</sup> KOMPAK & BaKTI. (2019). *Laporan Tiga Bulanan: Program LANDASAN II Periode Oktober–Desember 2019*. [dokumen tidak diterbitkan]

<sup>31</sup> KOMPAK. (2021). *Berita KOMPAK April 2021*. KOMPAK.

<sup>32</sup> Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung-Otonomi Khusus (PROSPPEK - OTSUS) bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kampung, kelurahan, dan distrik dalam bidang ekonomi maupun pelayanan dasar, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP), dengan pembiayaan dari Dana Otonomi Khusus.

<sup>33</sup> SAIK+ merupakan pemutakhiran dari SAIK yang sudah ada sebelumnya. Perbedaannya terletak pada beberapa fitur yang disertakan. Singkatnya, SAIK+ jauh lebih lengkap dibandingkan SAIK.

<sup>34</sup> KOMPAK. (2021). *Berita KOMPAK April 2021*. KOMPAK.

## Manajemen Keuangan Publik yang Lebih Kuat untuk PASH

Salah satu mandat tambahan bagi LANDASAN II adalah memberikan input teknis kepada pemerintah kabupaten terkait perlunya revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) dalam menanggapi pandemi Covid-19.<sup>35</sup> Mandat ini telah dilaksanakan di setiap kabupaten dampingan. Namun, input teknis tidak bisa diberikan secara efektif karena beberapa kabupaten (Kabupaten Jayapura, Sorong, dan Kaimana) sudah terlebih dahulu merevisi APBK menggunakan Surat Edaran Bupati. Untuk Kabupaten Nabire, Asmat, Boven Digoel, dan Manokwari Selatan yang sedang menyusun revisi aturan pelaksanaan APBK, informasi mengenai pedoman dan aturan terkait, termasuk input tentang perhitungan target penerima bantuan dengan memanfaatkan data SAIK, dikomunikasikan oleh staf LANDASAN II.

Wabah Covid-19 yang membatasi pergerakan dan interaksi menimbulkan tekanan terhadap upaya LANDASAN II dalam mempercepat kegiatan, terutama untuk mengejar berbagai ketertinggalan baik akibat penundaan kegiatan di tahun 2019 maupun akibat kondisi gangguan keamanan di wilayah Papua dan Papua Barat.<sup>36</sup>

Dalam upaya mengantisipasi Covid-19, beberapa kampung di Kabupaten Sorong menutup akses masuk ke daerahnya.<sup>37</sup> Konsekuensinya, kegiatan-kegiatan tertentu harus disesuaikan ataupun ditunda, termasuk beberapa kegiatan mentoring bagi kader dan pendampingan terkait SAIK+. Pelatihan kader tidak bisa dilakukan sekaligus di tingkat kabupaten sebagaimana direncanakan di awal,<sup>38</sup> tetapi mentoring ataupun kelas-kelas pelatihan bagi kampung yang berdekatan tetap harus diadakan. Akibatnya, pelatihan bagi seluruh kader kampung menjadi lebih lama daripada yang diperkirakan. Selain itu, kegiatan pengumpulan data di lapangan, seperti survei KOMPAK, dan pembaruan data-data program ikut terhambat.

Pandemi Covid-19 juga memengaruhi beberapa tindak lanjut penyelesaian dokumen perencanaan yang telah dilakukan pada kuartal pertama tahun 2021. Oleh karena itu, pendampingan terhadap kampung dan unit layanan masih dilakukan hingga awal kuartal ketiga.<sup>39</sup> Kampung dan unit layanan yang belum memiliki dokumen perencanaan untuk tahun 2020 telah difasilitasi secara penuh hingga menghasilkan dokumen akhir.

<sup>35</sup> KOMPAK & BaKTI. (2020). *Laporan Tiga Bulanan: Program LANDASAN II Periode April–Juni 2020*. [dokumen tidak diterbitkan]

<sup>36</sup> KOMPAK & BaKTI. (2020). *Laporan Tiga Bulanan: Program LANDASAN II Periode Januari–Maret 2020*. [dokumen tidak diterbitkan]

<sup>37</sup> KOMPAK & BaKTI. (2020). *Laporan Tiga Bulanan: Program LANDASAN II Periode April–Juni 2020*. [dokumen tidak diterbitkan]

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> KOMPAK & BaKTI. (2020). *Laporan Tiga Bulanan: Program LANDASAN II Periode Juli–September 2020*. [dokumen tidak diterbitkan]

## Pengembangan Fasilitas Layanan Adminduk bagi Semua Warga Mulai dari Desa

Walaupun KOMPAK-LANDASAN II telah mendorong kerja sama dengan unit layanan untuk meningkatkan kualitas layanan dasar, kepemilikan dokumen kependudukan di Provinsi Papua dan Papua Barat masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah maraknya pernikahan adat yang sulit diurus dokumennya sehingga menghambat pengurusan dokumen kependudukan lain yang terkait.

Bermodalkan penguatan tata kelola di tingkat desa yang sudah lebih dahulu didorong oleh LANDASAN di Provinsi Papua dan Papua Barat, model fasilitasi adminduk di desa berpotensi meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di beberapa distrik dampingan. Konsep fasilitasi adminduk di desa ini mulai diperkenalkan kepada pemangku kepentingan di wilayah dampingan di Papua dan Papua Barat pada tahun 2019 melalui serangkaian pertemuan dan diskusi mengenai dukungan teknis yang dapat diberikan oleh program PASH. Rencana advokasi, pendampingan, dan pelatihan fasilitasi adminduk di desa di wilayah Papua dan Papua Barat disusun pada tahun 2020. Namun, pelaksanaannya terhambat pandemi Covid-19 dan harus dilakukan secara daring.

Berdasarkan Survei KOMPAK pada bulan Juni 2021, seluruh desa di kabupaten dampingan KOMPAK di Provinsi Papua belum menerapkan model fasilitasi adminduk di desa. Sementara di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari Selatan telah menerapkan model fasilitasi adminduk di desa di 34 desa (60%). Kabupaten Fakfak dan Sorong belum menerapkannya karena advokasi model fasilitasi adminduk di desa baru dilakukan pada tahun 2019 dan tindak lanjutnya terhambat karena pandemi. Peningkatan kapasitas untuk fasilitator PASH direncanakan akan dilakukan pada akhir tahun 2021.<sup>40</sup> Upaya mendorong layanan adminduk di tingkat desa juga bersinergi dengan penerapan SAIK+ di Papua Barat dan Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua) di Papua.

SID di Provinsi Papua dan Papua Barat, khususnya di desa, telah diterapkan sejak tahun 2015. KOMPAK meneruskan upaya untuk mendukung pengembangan SID hingga sekarang. Saat ini, SID yang tengah dikembangkan adalah SAIK+ di Papua Barat dan SIO Papua di Papua.<sup>41</sup>

SAIK merupakan sistem berbasis web yang berisi data kependudukan, sosial, dan ekonomi setiap warga kampung (desa). Sistem ini dapat beroperasi

---

<sup>40</sup> Hasil observasi pengelola program.

<sup>41</sup> Ibid.

secara luring sehingga bisa dioperasikan di daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki infrastruktur telekomunikasi. SAIK dan SAID menjadi solusi yang tepat karena sistemnya yang sederhana dan memberdayakan sumber daya lokal. Proses input data ke dalam sistem mudah sehingga para kader dapat menjalankannya secara mandiri. Kekuatan SAIK dan SAID memang tidak lepas dari peran kader di tiap kampung. Hingga tahun 2019, program KOMPAK-LANDASAN II telah melatih 443 orang kader, 112 orang di antaranya adalah perempuan yang tinggal di 225 kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat.<sup>42</sup>

Pada tahun 2019, aplikasi SAIK+<sup>43</sup> yang dikembangkan melalui kegiatan swakelola KOMPAK telah siap versi daringnya.<sup>44</sup> Aplikasi ini rencananya akan digunakan untuk menggantikan versi SAIK sebelumnya yang telah diterapkan di banyak kampung dalam wilayah program LANDASAN II. Versi baru ini diharapkan dapat mengatasi berbagai kelemahan yang dialami pada versi sebelumnya sekaligus dapat dikembangkan untuk dihubungkan dengan berbagai sistem berbasis data penduduk di pemerintahan kabupaten, provinsi, bahkan pusat. ToT untuk penerapan SAIK+ sudah dilakukan untuk 16 orang staf kabupaten dari

4 kabupaten target di Papua Barat beserta 10 orang staf lapangan program LANDASAN II.

Sepanjang April–Juni 2020, program PASH berhasil menyelenggarakan ToT dan pelatihan SIO Papua untuk kader dan aparatur kampung.<sup>45</sup> Program melatih 10 orang koordinator kabupaten (korkab) dan koordinator distrik (kordis) melalui pertemuan virtual. Peserta ToT kemudian melatih kader melalui mentoring dan pertemuan kluster kecil untuk pendataan SIO Papua di 21 kampung dan pengoperasian SIO Papua di 18 kampung dari total 57 kampung dampingan. Hingga akhir Juni 2020, kader terlatih telah berhasil mendata dan memutakhirkan 795 KK dari estimasi total 7.133 KK di wilayah dampingan di Provinsi Papua. Sejumlah 132 KK telah diinput ke dalam sistem SIO Papua.

Pelatihan SAIK+ untuk kader-kader kampung melalui mentoring dilakukan oleh staf LANDASAN II melalui para koordinator kabupaten dan koordinator distrik.<sup>46</sup> Metode ini berhasil melatih kader untuk pendataan dengan SAIK+ di 42 kampung dan pengoperasian SAIK+ di 7 kampung dari total 88 kampung dampingan. Hingga akhir Juni 2020, kader terlatih telah berhasil mendata dan

---

<sup>42</sup> KOMPAK. (2019). *Berita KOMPAK Maret 2019*. KOMPAK.

<sup>43</sup> Sistem Aplikasi SAIK+ adalah aplikasi penjarang data kampung dan kelurahan di seluruh wilayah Papua Barat yang berfungsi meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi dasar kampung sehingga dapat mendukung administrasi pemerintahan, perencanaan pembangunan, peningkatan layanan dasar, dan pengembangan kegiatan ekonomi kampung. Penjelasan diambil dari <https://saikplus.papuabaratprov.go.id>.

<sup>44</sup> KOMPAK & BaKTI. (2020). *Laporan Tiga Bulanan: Program LANDASAN II Periode Januari–Maret 2020*. [dokumen tidak diterbitkan]

<sup>45</sup> KOMPAK & BaKTI. (2020). *Laporan Tiga Bulanan: Program LANDASAN II Periode April–Juni 2020*. [dokumen tidak diterbitkan]

<sup>46</sup> Ibid.

memutakhirkan 4.870 KK dari estimasi total 9.209 KK di wilayah dampingan di Provinsi Papua Barat. Sejumlah 11 KK telah diinput ke dalam sistem SAIK+.

Pelatihan SAIK+ dan SIO Papua bagi kader-kader kampung yang telah dimulai sejak kuartal kedua masih terus berlanjut di kuartal ketiga. Hingga akhir kuartal ketiga (periode Juli–September) tahun 2020, pelatihan kader kampung baru diselesaikan di 121 kampung (83%) sebagai prioritas awal dari 146 kampung yang termasuk dalam wilayah program LANDASAN II. Jumlah kader yang telah dilatih untuk pendataan dan pengoperasian sebanyak 176 orang kader (133 laki-laki dan 33 perempuan). Sejauh ini, 112 kampung (77%) telah memulai dan sedang memproses pendataan, sementara 59 kampung di antaranya telah merampungkan proses pendataan dan pemutakhiran data. Selain itu, kampung yang telah memulai penginputan berjumlah 81 dan 16 kampung di antaranya telah merampungkan penginputan.<sup>47</sup>

Metode pelatihan yang sebagian besar harus disesuaikan dengan cara mentoring kader satu per satu ke tiap kampung sangat memakan waktu. Pelatihan penggunaan aplikasi hingga saat ini masih membutuhkan jaringan internet sehingga pelaksanaannya terhambat di kampung-kampung yang memiliki masalah jaringan internet.

Proses lanjutan setelah pelatihan kader adalah pendataan dan penginputan data masyarakat. Proses penyelesaian pendataan dan penginputan keluarga memang lebih banyak berada di luar kontrol program LANDASAN II sebab pelaksanaannya bertumpu pada kader yang merupakan sukarelawan dari kampung. Pandemi Covid-19 makin membuat kerja para sukarelawan ini menumpuk.<sup>48</sup> Akibatnya, kemajuan dan laju pendataan antara tiap kampung menjadi sangat bervariasi dan tidak dapat dipastikan oleh program. Namun, program terus berupaya mendorong serta memotivasi kampung dan para kader, serta pada batasan tertentu, memfasilitasi kebutuhan pendataan seperti perbanyak formulir pendataan.

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Kabupaten Jayapura tentang penganggaran kampung untuk mendukung pelayanan adminduk, proses advokasi telah dilakukan oleh LANDASAN II pada periode sebelumnya. Kemudian, LANDASAN II kembali mengadvokasi terbangunnya kerja sama antara Disdukcapil Kabupaten Jayapura dan kampung-kampung, serta antara Disdukcapil dan sektor pendidikan maupun kesehatan untuk meningkatkan pelayanan adminduk.<sup>49</sup>

Advokasi tersebut membuahkan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dinas Dukcapil Kabupaten

<sup>47</sup> KOMPAK & BaKTI. (2020). *Laporan Tiga Bulanan: Program LANDASAN II Periode Juli–September 2020*. [dokumen tidak diterbitkan]

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> KOMPAK & BaKTI. (2020). *Laporan Tiga Bulanan: Program LANDASAN II Periode April–Juni 2020*. [dokumen tidak diterbitkan]

Jayapura dengan pemerintah dari tujuh kampung yang ada di Distrik Sentani Timur, serta penandatanganan perjanjian kerja sama antara Disdukcapil Kabupaten Jayapura dan Dinas Pendidikan Jayapura. Pertemuan untuk penandatanganan perjanjian kerja sama Disdukcapil dengan pemerintah kampung di Distrik Sentani Timur difasilitasi oleh LANDASAN II dan diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2020. Sementara itu, penandatanganan perjanjian kerja sama antara Disdukcapil dengan Dinas Pendidikan diselenggarakan langsung oleh Disdukcapil pada tanggal 18 Juni 2020.

Pada saat yang sama, KOMPAK dan PUSKAPA menyusun pedoman dan prosedur operasi standar untuk fasilitasi adminduk di desa. Dokumen ini terdiri atas materi pelatihan dan panduan penyelenggaraan layanan PASH berbasis desa. Pedoman ini juga memberikan gambaran bagi pemerintah desa dan kabupaten tentang cara menghubungkan layanan adminduk dan mengalokasikan dana untuk adminduk menggunakan APBDesa. Pedoman dan prosedur operasi standar ini mendukung kerja PASH di Provinsi Papua dan Papua Barat, khususnya dalam mendorong pengembangan model fasilitasi adminduk di desa di kedua provinsi.

Untuk mengembangkan model fasilitasi adminduk di desa, program membentuk kelompok kerja (pokja) adminduk di Provinsi Papua Barat dan tim koordinasi

percepatan adminduk di Provinsi Papua. Pokja adminduk dan tim koordinasi percepatan adminduk akan dilatih untuk menjadi fasilitator/pelatih untuk kemudian melatih kader kampung. Sayangnya, pelatihan untuk kader kampung belum dapat dilaksanakan karena pandemi Covid-19, sehingga menghambat pengembangan model fasilitasi adminduk di desa di kedua provinsi.<sup>50</sup>

Walaupun pelatihan fasilitasi adminduk di desa bagi kader kampung tertunda, kader kampung sudah ada di semua daerah percontohan. Setelah mengikuti program peningkatan kapasitas terkait adminduk, kader kampung bisa berperan lebih aktif sebagai kader PASH. Di Kabupaten Jayapura, peningkatan kapasitas bagi kader PASH telah terlaksana pada penghujung tahun 2021.

---

<sup>50</sup> Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

## **Penguatan Layanan Adminduk bagi Masyarakat Rentan pada Masa Pandemi Covid-19 di Papua dan Papua Barat**

Pada tahun 2020, saat pemerintah meluncurkan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak Covid-19, Kampung Sabron Sari di Sentani bisa dengan mudah mendata warga, memverifikasi data penerima bantuan, dan menyalurkan BLT-Dana Desa.<sup>51</sup> Proses pendataan yang cepat ini terjadi sejak Sabron Sari memanfaatkan SAIK yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Papua bersama KOMPAK.

Pemanfaatan SAIK dalam penyusunan data penerima bantuan sosial sebagai aksi tanggap Covid-19 juga dilakukan di 34 kampung yang ada di Distrik Momi Waren, Ransiki, dan Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan. SAIK berkontribusi pada tercapainya 100% penyaluran BLT-Dana Desa di kabupaten ini. SAIK, yang menyajikan data lengkap terkait kependudukan, kepemilikan aset, dan peringkat kesejahteraan, dirasa sangat membantu dalam proses identifikasi keluarga miskin dan rentan yang terdampak Covid-19.

Program PASH juga memberikan bantuan teknis kepada pemerintah desa untuk memperbarui data kelompok miskin dan rentan. Selain itu, program juga memberikan pelatihan kepada fasilitator PASH desa tentang cara mengidentifikasi dan mengumpulkan data penduduk rentan yang terdampak Covid-19.

## **Penjangkauan Kelompok Rentan**

Pada tahun 2020, program LANDASAN II berupaya mendorong keterlibatan perempuan dan penyandang disabilitas dalam perencanaan di kampung. Upaya ini dilakukan pada saat kegiatan pendampingan sinergi perencanaan antara kampung dan unit layanan.<sup>52</sup> Selain itu, program juga secara khusus mendorong peserta kegiatan pendampingan tersebut agar memperhatikan kebutuhan kaum perempuan dan penyandang disabilitas.

LANDASAN II selalu memastikan keterlibatan perempuan dalam kegiatannya, seperti dalam pelatihan kader kampung. Keterlibatan aktif perempuan juga senantiasa ditampilkan dalam produk komunikasi LANDASAN II untuk memotivasi keterlibatan perempuan di wilayah lainnya.<sup>53</sup>

Selain itu, program ini juga mengembangkan sistem basis data kampung (SAIK+ dan SIO Papua)

<sup>51</sup> KOMPAK. (2020). *Berita KOMPAK November 2020*. KOMPAK.

<sup>52</sup> KOMPAK & BaKTI. (2020). *Laporan Tiga Bulanan: Program LANDASAN II Periode Januari–Maret 2020*. [dokumen tidak diterbitkan]

<sup>53</sup> KOMPAK & BaKTI. (2020). *Laporan Tiga Bulanan: Program LANDASAN II Periode Juli–September 2020*. [dokumen tidak diterbitkan]



serta menyediakan data terpilah gender dan kondisi ekonomi di dalamnya. Ketersediaan data terpilah tersebut

diharapkan mendorong perencanaan yang responsif terhadap kebutuhan gender dan kondisi ekonomi masyarakat.



## F. Kolaborasi dengan Program Unggulan (*Flagship*) KOMPAK lainnya

Keterhubungan kerja PASH di Papua dan Papua Barat dengan Program Unggulan (flagship) KOMPAK lainnya terletak pada pemanfaatan data SAIK+ dan SIO Papua. Ketika akan melakukan advokasi, program kemudian bekerja sama dengan tim Pengelolaan Keuangan Publik (*Public Finance Management/PFM*) untuk melakukan penganggaran.

Sementara itu, jika dalam pelaksanaannya dibutuhkan intervensi dari kecamatan, program akan bekerja bersama dengan Penguatan Kecamatan dan Desa (*Kecamatan and Village Strengthening/KVS*) untuk mengoptimalkan peran kecamatan dalam penguatan PASH.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Berdasarkan hasil observasi pengelola program.



## G. Pembelajaran

**Sebagian besar kerja advokasi perbaikan tata kelola, termasuk dalam PASH, bergantung pada komitmen dan kapasitas aktor-aktor di pemerintahan daerah dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki pengaruh untuk mendorong perubahan.**

Investasi program-program seperti PASH ada pada relasi dan jejaring yang dibangun selama implementasi, alih-alih hanya luaran teknis yang dihasilkan seperti kebijakan dan petugas yang terlatih. Di Provinsi Papua dan Papua Barat, investasi ini terlihat dari upaya program untuk merangkul penggerak perubahan di instansi-instansi strategis seperti Bappeda, Disdukcapil, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) di tingkat provinsi dan kabupaten. Selain itu, kerja-kerja program di Papua dan Papua Barat juga ditunjang oleh jejaring mitra lokal dan lembaga swadaya masyarakatnya, seperti BaKTI, komunitas gereja, dan kader-kader kampung.

Pelibatan mitra lokal yang berpengalaman dan berjejaring luas membantu program menjangkau penggerak perubahan di instansi pemerintah maupun pegiat sosial dalam masyarakat. Pegiat sosial di wilayah dampingan program kemudian membantu menyosialisasikan berbagai pendekatan baru kepada masyarakat. Namun, program menyadari bahwa pelibatan organisasi masyarakat lokal yang khusus berdiri dan bekerja di Papua dan Papua Barat belum sepenuhnya terlaksana. Ke depannya, program merekomendasikan pendampingan dan peningkatan kapasitas OMS yang berbasis di Papua dan Papua Barat.

**Pada saat yang sama, besarnya peran aktor dan penggerak perubahan (champion) PASH dapat menjadi pendorong sekaligus penghambat keberlanjutan PASH setelah kerja KOMPAK berakhir.**

Mutasi dan pergantian jabatan kerap terjadi di kabupaten-kabupaten wilayah dampingan di Provinsi Papua dan Papua Barat<sup>55</sup>. Minat, kesadaran, dan komitmen untuk penguatan PASH harus tetap terjaga meski ada pergantian personel. Ini sama pentingnya dengan pelembagaan model

atau pendekatan PASH dalam bentuk peraturan, pendanaan, dan tata kelola. Di sisi lain, tantangan ini bisa menjadi kesempatan untuk berbagi pengetahuan. Penggerak perubahan yang dipindah dapat menularkan pengetahuan PASH di wilayah kerja barunya.

**Untuk memastikan keberlanjutan, pelembagaan inovasi tidak cukup berhenti pada regulasi dan penganggaran, tetapi juga penerjemahan keduanya ke dalam tata kelola yang melingkupi sistem dan prosedur, serta internalisasi norma dan praktik baik bagi semua pihak yang terlibat.**

Melalui berbagai regulasi, program memastikan bahwa komitmen untuk melanjutkan inovasi memiliki dasar

hukum yang jelas. Advokasi pelembagaan dalam bentuk lokakarya harus melibatkan pemerintah daerah dari kabupaten-

<sup>55</sup> Mid-Term Review Papua dan Papua Barat.

kabupaten target program KOMPAK di Provinsi Papua dan Papua Barat.<sup>56</sup> Selain memberikan informasi komprehensif tentang program-program KOMPAK yang telah dilakukan, lokakarya ini juga membantu pemerintah daerah mengintegrasikan program-program tersebut ke dalam prioritas pembangunan daerah, dengan memberikan berbagai instrumen yang memudahkan perhitungan dan penyiapan dokumen penganggarnya. Pada tahun 2020 hingga 2021, program menghadapi tantangan pergeseran anggaran karena pandemi Covid-19.

Selain itu, penganggaran juga masih menunggu kejelasan implementasi OTSUS tahun 2022, sehingga proses perencanaan kegiatan tahun 2022 yang didanai OTSUS belum dapat dilakukan. Selain itu, memastikan ketersediaan anggaran untuk membangun infrastruktur yang baik di wilayah Papua dan Papua juga sangat penting. Di beberapa kampung, upaya mempercepat proses penginputan data penduduk kampung ke sistem basis data SIO Papua dan SAIK+ terhambat masalah kualitas dan ketersediaan jaringan internet.<sup>57</sup>

**Pelaksanaan program seperti PASH di wilayah dengan konteks khusus seperti Papua dan Papua Barat membutuhkan kecermatan lebih dalam hal kesetaraan gender, perlindungan untuk penyandang disabilitas dan kelompok khusus, serta inklusi sosial.**

Perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok khusus lainnya lebih rentan tersisihkan. Karenanya, harus dipastikan bahwa program tidak akan memperbesar ketimpangan ataupun membahayakan keselamatan, tetapi justru mendorong keterlibatan kelompok-kelompok tersebut secara bermakna. Program BANGGA Papua memberikan pelajaran bahwa pemberdayaan perempuan dapat mendorong kesejahteraan rumah tangga di Papua. Kader-kader kampung perempuan yang direkrut dan dilatih juga memberikan contoh bagaimana

perempuan dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi masyarakat. Sementara itu, banyaknya pernikahan adat di wilayah Papua dan Papua Barat yang menyulitkan pencatatan perkawinan berpotensi menghambat akses kelompok rentan seperti perempuan dan anak ke layanan dasar. Oleh karena itu, kebijakan khusus diperlukan untuk mengatasi masalah pernikahan adat yang tidak tercatat, seperti dengan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

<sup>56</sup> KOMPAK & BaKTI. (2020). *Laporan Tiga Bulanan: Program LANDASAN II Periode Juli–September 2020*. [dokumen tidak diterbitkan]

<sup>57</sup> KOMPAK & BaKTI. (2020). *Laporan Tiga Bulanan: Program LANDASAN II Periode April–Juni 2020*. [dokumen tidak diterbitkan]

**Secara khusus, PASH juga belajar tentang penerapan kebijakan afirmatif atau kebijakan khusus untuk Orang Asli Papua (OAP).**

Program penguatan layanan dan pemberdayaan ekonomi seperti BANGGA Papua menyambut baik upaya lebih untuk memprioritaskan hak warga rentan di Papua dalam mengakses layanan dasar berkualitas. Penyelenggaraan program perlu menerjemahkan upaya lebih tersebut dalam kebijakan, sistem, maupun prosedur. Perbaikan kebijakan dan tata kelola juga turut diiringi dengan upaya lebih dalam penjangkauan,

pelibatan, pendekatan, fasilitasi, hingga pemantauan. Akan tetapi, tidak lupa pula bahwa selalu ada risiko tersisihnya kelompok warga lain yang tidak termasuk dalam suatu kebijakan afirmatif. Dalam konteks ini, contohnya adalah para pendatang yang tidak berdokumen atau belum tercatat. Meski bukan OAP, mereka juga harus tetap dipertimbangkan sebagai warga rentan.



## Lampiran: Peraturan yang Didukung Program



No.	Judul Peraturan
1.	Peraturan Bupati Jayapura Nomor 65 Tahun 2020 tentang Percepatan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Jayapura
2.	Peraturan Bupati Nabire Nomor 2 Tahun 2021 tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Nabire
3.	Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan
4.	Peraturan Bupati Sorong Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan

---

**Mitra Strategis PASH:**

Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA).

**Penulis:**

Shaila Tieken, Widi Laras Sari, dan Santi Kusumaningrum.

**Metodologi:**

Tinjauan pustaka sistematis dari sekitar 91 dokumen program yang terdiri dari laporan kegiatan, laporan penelitian, lembar kebijakan, dokumen teknis, serta buletin.

**Cerita Pendampingan ini merupakan bagian dari laporan akhir Program Unggulan KOMPAK (*Flagship*) Penguatan Adminduk dan Statistik Hayati (PASH) 2015 –2022.**

---

**PUSKAPA**

Pusat Kajian & Advokasi Perlindungan  
& Kualitas Hidup Anak  
(Center on Child Protection and  
Wellbeing)  
Universitas Indonesia  
Gedung Nusantara II FISIP, Lantai 1  
Kampus UI, Depok, 16424  
T: (021) 78849181 F: (021) 78849182  
www.puskapa.org

**KOMPAK**

Jalan Diponegoro No. 72, Jakarta 10320  
Indonesia  
T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090  
E: info@kompak.or.id  
www.kompak.or.id





**Cerita Pendampingan  
KOMPAK - PASH**  
di Provinsi Papua dan Papua Barat



Australian Government